

## Badau 'di' Indonesia : Kasus Daerah Perbatasan Indonesia yang Masih Terlantar Studi Kasus Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Ririh Megah Safitri

UIN Walisongo

[ririh.megah.safitri@walisongo.ac.id](mailto:ririh.megah.safitri@walisongo.ac.id)

### Abstrak

Letak geografisnya yang bersandingan langsung dengan Lubok Antu (Serawak) menjadikan Badau sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Serawak yang penuh dengan permasalahan sosial. Pemenuhan kebutuhan vital atas pangan, pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi isu pertama dalam tulisan ini. Pada kenyataannya, situasi dan kondisi di perbatasan mengkonstruksi ketergantungan masyarakat Badau atas Lubok Antu (Serawak). Akses yang mudah, cepat dan jenis kualitas barang-jasa dari Lubok Antu (Serawak) menjadi point lebih yang melatarbelakangi ketergantungan tersebut. Persoalan vital lain yakni eksistensi perlindungan hukum bagi masyarakat perbatasan. Heterogenitas masyarakat Badau baik dari latar belakang etnis, agama dan stratifikasi sosial membuat potensi konflik semakin tinggi. Selain itu ketegangan antar negara bisa saja terjadi, khususnya konflik terkait pekerja (illegal-legal). Pada konteks ini, aparat negara harus berperan secara maksimal disamping peraturan dan aparat dari adat (Dayak – Melayu). Terpautnya jarak antara pusat pemerintahan dan Badau lantas berujung pada berbagai bentuk ketidakpastian kehidupan yang dijalani oleh masyarakat Badau. Pendidikan dan jaminan kesehatan bagi anak dan remaja menjadi salah satu point penting dalam upaya pemberian kepastian bagi masyarakat perbatasan. Statusnya sebagai daerah yang terpelosok dan terpencil tersebut tidak bisa menjamin kelancaran distribusi baik barang, jasa maupun peraturan dari pemerintah kepada masyarakat di Badau.

Kata Kunci : *Perbatasan, Disfungsi, Negara, Badau, Lubok Antu, Kalimantan Barat, Serawak*

### Pendahuluan

Berbagai bentuk keterbatasan di daerah perbatasan telah menjadi isu pokok dalam setiap perdebatan belakangan ini. Terpautnya jarak antara pemerintah pusat dengan daerah perbatasan memang menjadi satu faktor penting yang melatarbelakangi berbagai bentuk keterbatasan, seperti terbatasnya akses dan aset guna menunjang kehidupan masyarakat perbatasan. Faktanya jarak yang cukup jauh juga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat perbatasan, baik pelayanan negara oleh aparat pemerintah pusat maupun pelayanan yang diberikan oleh aparat yang bertugas di wilayah perbatasan.

Berbagai bentuk keterbatasan dan kualitas layanan tersebut pada akhirnya berpengaruh pada kualitas hidup yang dimiliki oleh masyarakat perbatasan. Permasalahan kualitas hidup masyarakat perbatasan menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji mengingat dewasa ini ketimpangan pada bidang ekonomi politik antar masyarakat Indonesia terlihat mencolok. Di satu sisi, sekelompok masyarakat memiliki akses dan aset yang berlimpah namun disisi lain masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akses dan aset maksimal. Seperti halnya ketimpangan di wilayah perbatasan yang dalam konteks ini merujuk pada Kecamatan Badau, Kabupaten

Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Lubok Antu, Sarawak.

Terbatasnya fasilitas dan pelayanan di wilayah perbatasan menjadikan masyarakat Badau menjadi masyarakat yang terlantar. Pada konteks ini, terlantar merujuk pada suatu kondisi dimana masyarakat Badau kurang diurus dengan seksama oleh aparat pemerintah Indonesia, baik tentang distribusi kebutuhan pangan maupun fasilitas penunjang hidup lain. Distribusi pangan dari pusat (Indonesia) masih terbatas jumlahnya, mengingat jarak yang jauh ditambah dengan medan jalan yang tidak layak. Kondisi tersebut memaksa masyarakat Badau untuk mencari sumber pangan lain guna mempertahankan kelangsungan hidupnya, yakni bahan pangan dari Lubok Antu, Serawak.

Kondisi masyarakat yang seakan terlantar juga dikaji melalui berbagai bentuk kesulitan hidup masyarakat Badau akibat terbatasnya fasilitas negara yang disediakan. Masyarakat Badau saat ini menggunakan aliran listrik dari Serawak, meskipun PT. PLN hadir di Badau untuk mengurus administrasinya. Hal yang sama juga terjadi pada aspek lain seperti pendidikan dimana sebagian masyarakat cenderung memilih untuk menyekolahkan anaknya di Serawak daripada di Badau, mengingat kualitas pendidikan di Badau yang kurang baik karena terbatasnya distribusi bahan ajar dan fasilitas pendidikan yang lain.

Keterbatasan dan kesulitan hidup masyarakat Badau menyebabkan masyarakat sulit mencapai kesejahteraan hidup. Kondisi tersebut menjadi dasar munculnya interaksi masyarakat Badau dengan Lubok Antu (Serawak) guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga saat ini interaksi yang terjalin hingga memunculkan ketergantungan tersebut masih tetap berlangsung. Pada dasarnya keterbatasan dan kesulitan yang dialami masyarakat Badau bukanlah sebuah nasib yang harus ditanggung oleh daerah perbatasan, namun proses marginalisasi yang membuat masyarakat Badau terlantar dan jauh dari negara.

Pada tulisan ini status terlantar yang disandang oleh masyarakat perbatasan akan diuraikan dalam tiga bagian. Pertama adalah rasa gelisah yang dirasakan oleh masyarakat Badau terkait dengan beberapa aspek, seperti kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian yang selalu menjadi permasalahan hidup sehari-hari.

Keterbatasan akses dan aset dalam aspek-aspek tersebut pada akhirnya memunculkan rasa gelisah dalam keberlangsungan masyarakat Badau. Jauh dari pusat pemerintahan, faktanya membuat masyarakat Badau jauh pula dari proteksi negara khususnya proteksi hukum. Pada dasarnya negara telah menempatkan aparat-aparat pemerintahan dan aparat keamanan guna melindungi warga, hanya saja yang menjadi permasalahan dalam konteks ini yakni totalitas peran aparat yang bertugas dalam membela masyarakat Badau.

Proteksi hukum yang masih dinilai kurang tersebut akan menjadi pokok bahasan pada bagian yang kedua. Proses marginalisasi yang menyebabkan masyarakat Badau berada pada kondisi terlantar juga memunculkan masalah baru yakni ketidakpastian. Pada konteks ini masyarakat Badau seringkali menghadapi ketidakpastian akan masa depan, khususnya bagi golongan anak dan remaja. Berbagai fakta terkait dengan situasi ketidakpastian masyarakat Badau akan dipaparkan pada bagian ketiga.

### **Badau sebagai Daerah Perbatasan**

Badau telah menjadi teras depan Indonesia, mengingat lokasinya yang berbatasan langsung dengan Lubok Antu, Serawak<sup>1</sup>. Desa Badau sendiri masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Letak geografis yang berdampingan menjadi pemicu munculnya interaksi yang terjalin antara masyarakat Badau (Indonesia) dan masyarakat Lubok Antu (Serawak, Malaysia). Interaksi yang terjalin berdasar pada beragam kepentingan, seperti pemenuhan kebutuhan primer,

jual beli kebutuhan sekunder dan tersier, kepentingan menuntut ilmu, mencari pekerjaan maupun sekedar bersilahturahmi biasa. Berbagai bentuk interaksi seakan bebas dilakukan karena memang tidak terdapat pagar batas tinggi yang memisahkan keduanya, melainkan wilayah administratif Badau dan Lubok Antu (Serawak) dibatasi dengan patok dan tugu batas yang ditanam dengan jarak yang sudah ditentukan.

Tidak adanya pagar batas tinggi bukan berarti tidak ada peraturan yang mengikat antar masyarakat tersebut. Terdapat Pos Lintas Batas Nanga Badau yang ditujukan untuk mengatur setiap interaksi yang terjalin diantara masyarakat berikut memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan. Masyarakat Badau diwajibkan memiliki Pas Merah<sup>2</sup> untuk melakukan aktivitas di wilayah Lubok Antu.

Desa Badau terletak di pusat kegiatan administratif Kecamatan Badau, sehingga Desa Badau menjadi salah satu desa yang lebih ramai jika dibandingkan dengan desa lainnya. Lokasinya yang berada di pusat kecamatan menjadikan Desa Badau sebagai tujuan dari berbagai bentuk aktifitas masyarakat. Luas wilayah desa Badau yakni 67,08 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi dua dusun, dusun Badau I dan dusun Badau II. Terdapat 795 KK dengan total penduduk 2.677<sup>3</sup> jiwa yang mendiami Desa Badau.

Tidak hanya penduduk lokal saja yang mendiami Desa Badau melainkan juga terdapat pendatang-pendatang dari berbagai daerah yang tinggal bahkan mencari penghidupan di Badau. Kondisi tersebut mengakibatkan Badau menjadi rumah tinggal bagi berbagai etnis seperti Dayak, Minangkabau, Bugis dan Jawa. Keberagaman etnis di Badau justru menjadi faktor pendorong terciptanya toleransi dan kerukunan antar masyarakat.

Pendatang yang berada di Badau biasanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di instansi pemerintahan Badau. Selain itu masyarakat pendatang juga banyak yang

2Pas Merah merupakan sebutan yang merujuk pada surat ijin memasuki wilayah Lubok Antu untuk menggantikan pasport. Fungsi dan bentuknya sama dengan pasport, hanya saja jika pasport Indonesia berwarna kehijauan maka Pas Merah wilayah Badau berwarna merah. Pas Merah hanya dikhususkan bagi masyarakat yang tinggal di Kecamatan batas saja. Oleh karena itu Pas Merah hanya dapat digunakan di area tertentu, dalam konteks ini Pas Merah hanya dapat digunakan masyarakat Badau di sekitar Lubok Antu saja selebihnya masyarakat tetap harus menggunakan pasport jika akan memasuki wilayah lain di Serawak.

3Data Seksi Pemerintahan Kecamatan Badau 2012, Laporan Tahunan Kecamatan Badau 2012

1 Detail map of Nanga Badau <http://www.maplandia.com/indonesia/kalimantan-barat/kapuas-hulu/nangabadau> Diakses pada 3 April 2013 pukul 16.00 WIB

bergerak di sektor perdagangan. Jenis pekerjaan lain yang dimiliki masyarakat Badau yakni petani dan buruh perkebunan, mengingat banyak perkebunan sawit dan karet di sekitar Badau termasuk dalam perkebunan milik asing (Serawak).

Badau sebagai daerah perbatasan, memang selalu identik dengan fasilitas yang masih terbatas. Jarak yang terpaut jauh faktanya menjadi kendala utama dalam berbagai proses distribusi, baik distribusi barang, informasi, kebijakan hingga pada aspek vital seperti piranti kebutuhan kesehatan maupun pendidikan.

Kondisi tersebut sejalan dengan tulisan Abdullah terkait dengan daerah perbatasan yang mengalami kekurangan, ketimpangan dan kesulitan (Abdullah, 2013). Fasilitas publik yang berujud fisik, seperti jalan yang selalu menjadi sorotan utama.

Kondisi jalan di Badau memang memprihatinkan terlebih akses jalan dari Pontianak menuju Badau. Perjalanan menuju Badau dari Pontianak dapat ditempuh melalui 2 cara, pertama yakni cara darat dengan menumpang bus umum dan membutuhkan waktu kurang lebih 18 jam dan hanya ada 2 agen bus yang menyediakan perjalanan menuju ke Badau. Sedangkan cara yang kedua yakni menggunakan kendaraan air atau speed boat dengan menelusuri sungai-sungai kecil dan danau Sentarum untuk sampai di Lanjak hingga akhirnya menempuh perjalanan darat untuk dapat sampai ke Badau.

Pada umumnya warga lebih cenderung memilih perjalanan darat, mengingat armada bus yang sudah memiliki jadwal pemberangkatan rutin dan harganya yang lebih terjangkau. Meskipun demikian, perjalanan masih terasa sangat berat karena kualitas jalan yang sangat memprihatinkan, terlebih jalan dari Putussibau menuju Badau yang berupa jalan aspal bertanah dan berlubang di badan jalannya.

Kondisi jalan yang buruk juga ditambahi dengan jembatan-jembatan kayu yang nampak sangat rapuh dan mengharuskan supir bus untuk melewati lereng-lereng bukit disebelahnya. Faktanya tidak hanya jalan menuju ke Badau saja yang tidak layak, namun kondisi jalan di Badau itu sendiri yang kondisinya juga sudah tidak layak. Terdapat dua jenis jalan di desa Badau, yakni jalan negara<sup>4</sup> dan jalan non negara. Belakangan ini proyek perbaikan jalan negara tengah gencar dilakukan di Badau, hanya saja jalan-jalan biasa ditengah pedesaan masih sangat memprihatinkan bentuknya.

<sup>4</sup>Jalan negara merupakan jalan lintas utara yang mengarah ke PPLB Nanga Badau. Muncul suatu asumsi bahwa kualitas jalan negara yang baik merupakan satu syarat akan diresmikannya dan diakuinya PPLB Nanga Badau secara resmi.

Menurut pengamatan saya, aspek jalan tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya marginalisasi daerah Badau hingga akhirnya berdampak pada permasalahan distribusi barang, jasa dan informasi dari pusat ke Badau, mengingat jalan yang layak merupakan salah satu syarat tak tertulis atas berbagai proses distribusi barang, jasa, maupun informasi.

### **'Kegelisahan' Masyarakat Badau**

Tinggal di tempat yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan dan keramaian yang ditawarkan Indonesia, faktanya tidak membuat masyarakat Badau senang, nyaman ataupun tenang dalam menjalani kehidupan. Namun, justru sebaliknya yakni lokasinya yang sangat jauh dari pusat (dalam konteks ini pusat merujuk pada Indonesia) justru menjadi akar atas permasalahan besar dan tak kunjung berakhir dari masyarakat perbatasan tersebut.

Jarak yang terpaut sangat jauh tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu kegelisahan tersendiri bagi masyarakat Badau yang nota bene tinggal di kawasan perbatasan. Rasa gelisah yang dirasakan oleh masyarakat karena dasar distribusi yang belum adil dan merata, tersirat dalam beberapa contoh kasus keseharian masyarakat Badau.

Mata pencaharian atau jenis pekerjaan merupakan aspek pertama yang mampu menunjukkan rasa gelisah yang dialami oleh masyarakat. Lokasinya yang terletak diperbatasan Indonesia-Malaysia membuat masyarakat Badau tidak memiliki banyak pilihan untuk menentukan jenis pekerjaan yang dipilih. Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya memiliki suatu pandangan bahwa salah satu jenis pekerjaan yang mampu memberikan *prestige* adalah Pegawai Negeri Sipil.

Menurut pengamatan saya, status sebagai Pegawai Negeri Sipil mampu menjadi alasan atas berbagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Namun, kondisi tersebut lantas menjadi suatu permasalahan ketika kursi-kursi yang tersedia bagi status PNS di wilayah Badau sudah terisi penuh oleh para PNS utusan pusat yang ditugaskan atau ditempatkan di wilayah Badau. Dengan kata lain, kursi pegawai peyandang status PNS di berbagai instansi Badau (kesehatan, pendidikan, kecamatan, kelurahan, dll) justru didominasi oleh para pendatang.

Implikasi dari permasalahan tersebut yakni munculnya sektor-sektor jasa dan wirausaha non-formal yang harus digeluti masyarakat asli Badau untuk mempertahankan hidup. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa pendatang yang sukses di Badau dengan berwirausaha. Terdapat berbagai jenis pekerjaan wirausaha masyarakat asli Badau seperti penjual sayur dan lauk di pasar tradisional, penjual kue

tradisional, toko kelontong hingga pada usaha pembuatan pernak pernik adat dayak yang biasanya digunakan pada saat upacara adat. Seperti yang dilakukan oleh salah satu warga yang membuat baju adat dayak lengkap dengan aksesorisnya untuk dijual di wilayah Badau dan Lubok Antu.

Jenis pekerjaan penyedia jasa yang lain yakni rental taxi<sup>5</sup>. Minimnya jumlah angkutan umum dan mobil pribadi di wilayah Badau faktanya memberikan satu peluang usaha bagi masyarakat asli untuk menyediakan jasa rental. Jenis pekerjaan lain yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat yakni pekebun, baik sebagai buruh kebun asing maupun miliki Indonesia. Contoh kasus tersebut dapat memperlihatkan bahwa dalam bidang pekerjaan, masyarakat Badau asli justru menempati bagian-bagian yang tidak strategis atau dalam kata lain masyarakat Badau terkesan tersingkirkan dari jabatan-jabatan strategis di wilayah Badau.

Perbedaan ketrampilan, keahlian dan intelektualitas menjadi satu alasan yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Posisi-posisi sentral yang identik dengan orang yang pintar, orang yang ahli, orang yang pandai faktanya tidak merujuk pada masyarakat Badau asli (pemukim asli Badau yang lahir dan besar di Badau), melainkan justru merujuk pada pendatang-pendatang luar daerah.

Fasilitas pendidikan dan bentuk pelatihan yang terbatas di wilayah perbatasan dari dahulu hingga kini dapat menjadi satu faktor pembentuk ketrampilan dan keahlian masyarakat Badau. Tersingkirnya masyarakat Badau dari posisi-posisi strategis di wilayah Badau menjadi satu contoh kasus wujud kegelisahan yang dirasakan sebagai akibat dari proses marginalisasi dan minimnya berbagai fasilitas pendidikan.

Selain itu pendidikan yang kurang memberikan penyadaran atas kesiapan dan tanggung jawab telah mengkonstruksi sifat masyarakat Badau yang cenderung pemalas, khususnya dalam melakukan pekerjaannya. Buruh kerja lahan sawit dapat menjadi contoh atas kasus ini, bekerja di lahan sawit diibaratkan sebagai sampingan dalam artian para buruh tidak bekerja secara maksimal dalam satu hari penuh. Sebagai contoh jam istirahat yang dimulai pada pukul 12.00-13.00 WIB nyatanya tidak berlaku bagi sebagian pekerja, bahkan banyak diantara para pekerja yang tidak kembali ke kebun sawit pasca istirahat. Loyalitas dan tanggung jawab yang kurang menjadi satu alasan dasar atas tersingkirnya masyarakat-masyarakat Badau tersebut dalam posisi-posisi sentral di Badau hingga pada akhirnya

<sup>5</sup>Taxi merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut mobil pribadi yang disewakan atau direntalkan untuk mengantar jemput penumpang dari dan ke Badau

memunculkan suatu kegelisahan tersendiri bagi mereka atas pilihan pekerjaan yang sangat terbatas.

Rasa gelisah nampak selalu muncul dalam keseharian masyarakat Badau pada umumnya jika dihadapkan dengan isu kesehatan di Badau. Terpautnya jarak yang jauh faktanya juga berpengaruh pada kualitas penjamin kesehatan di Badau. Pernyataan tersebut dapat ditinjau melalui terbatasnya fasilitas dan sarana kesehatan yang terdapat di wilayah Badau. Instansi kesehatan yang dapat ditemui di Kecamatan Badau hanya 2 yakni Puskesmas Badau dan Rumah Sakit berjalan, dalam konteks ini rumah sakit berjalan merupakan suatu instansi kesehatan sejenis Puskesmas namun bergerak atau *mobile* di desa-desa yang masuk dalam administrasi Kecamatan Badau.

Lokasi dari rumah sakit bergerak ini berpindah-pindah dari desa satu ke desa yang lain dalam kurun waktu tertentu guna mempermudah masyarakat untuk mengakses sarana dan prasarana kesehatan, mengingat jarak antar desa satu dengan yang lainnya relatif jauh. Selain jumlah instansinya yang terbatas, sarana dan fasilitas kesehatannya pun juga dapat dikatakan masih terbatas. Pernyataan tersebut dapat ditinjau melalui banyaknya pasien yang dirujuk ke luar wilayah Badau untuk mendapatkan perawatan yang lebih layak. Bahkan banyak diantara masyarakat Badau yang cenderung memilih berobat dan melahirkan di Lubok Antu dan Serawak yang dianggap lebih baik daripada melakukan pengobatan di Badau.

Kegelisahan masyarakat Badau faktanya tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya jumlah instansi kesehatan di Badau, melainkan juga dikarenakan oleh kualitas tenaga medis atau tenaga kesehatan itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat beberapa tenaga medis yang tidak berasal dari jurusan kesehatan. Sebagai contoh di Puskesmas Badau, terdapat beberapa tenaga medis yang menyandang gelar sarjana ekonomi dan bekerja sebagai perawat yang bertanggung jawab pada pasien rawat inap. Rumah sakit bergerak hanya memiliki 2 dokter dan 1 perawat saja yang harus bertanggung jawab setiap harinya.

Tingginya jumlah penderita penyakit di Badau nampaknya dilatarbelakangi oleh gaya hidup yang kurang sehat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat nampak kurang steril dan terkesan kotor karena berwarna kecoklatan. Selain itu banyak diantara warga yang tidak memiliki sumur sendiri-sendiri dan bahkan masih banyak yang menggunakan aliran sungai guna memenuhi kebutuhannya akan air bersih.

Masyarakat Dayak yang masih tradisional biasanya memiliki hewan ternak seperti babi dan anjing yang tinggal sangat dekat dengan rumah yang mereka tinggali, misalnya di bawah rumah ataupun di samping rumahnya. Perilaku-perilaku yang berpotensi menyebar bibit penyakit tersebut nampak dibiarkan bahkan telah mentradisi.

Program-program sosialisasi penyadaran atas pentingnya hidup sehat oleh tenaga medis di Badau nampak masih kurang, mengingat masih banyaknya jumlah penderita diare dll. Sekelumit contoh tersebut menjadi sebuah gambaran atas kualitas kesehatan di wilayah pinggiran negara. Fasilitas yang kurang, kualifikasi para tenaga medis hingga pada program-program sosialisasi akan kesehatan yang masih sangat terbatas, faktanya menjadi satu permasalahan penting bagi masyarakat perbatasan untuk melangsungkan hidupnya.

Permasalahan yang kompleks tersebut terkadang menjadi alasan dasar masyarakat Badau untuk lebih memilih pengobatan ke wilayah seberang (Lubok Antu, Serawak). Terlebih jika masyarakat memiliki IC atau tanda penduduk Malaysia (merujuk pada kasus kepemilikan identitas ganda oleh masyarakat Badau yakni KTP untuk negara Indonesia dan IC untuk Malaysia) akan mendapat keringanan pengobatan hingga gratis.

Pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan manusia untuk menapaki tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan juga menjadi satu penentu atau dasar atas apa yang akan didapatkan individu ketika telah beranjak dewasa. Permasalahan akan muncul ketika individu-individu tidak mendapatkan akses terhadap fasilitas yang semestinya diduplikasinya, mengingat saat ini Indonesia memiliki sistem BOS (Bantuan Operasional Siswa) baik berupa dana *cash* ataupun alat penunjang pendidikan yang lain. Seharusnya kebijakan BOS diterapkan di Indonesia dengan seksama sehingga setiap anak dapat memperoleh haknya secara adil.

Ketidakadilan tersebut telah dirasakan oleh siswa-siswi perbatasan yang harus menerima keadaan atas keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Pada laporan tahunan Kecamatan Badau dapat dilihat bahwa kecamatan Badau memiliki 11 Sekolah Dasar yang harus menampung 806 siswa<sup>6</sup>. Sebagian besar SD terpusat di desa Badau yang merupakan pusat dari Kecamatan Badau. Kualifikasi dari tenaga pendidik juga menjadi satu permasalahan tersendiri di Badau. Sebagai contoh di SDN 01 Badau, dari 11 tenaga pendidik hanya 5 tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi resmi sebagai pengajar, sedangkan sisanya adalah tenaga pendidik honorer yang direkrut berdasarkan atas unsur kekerabatan dan sejenisnya.

Keterbatasan fasilitas pendidikan di Badau dapat ditinjau dari distribusi bahan ajar yang masih sangat terbatas. Merujuk pada salah satu tenaga pendidik (Ramli, 43 thn) masalah besar dalam dunia pendidikan yakni permasalahan kurikulum,

dimana pemerintah daerah mengharapkan penerapan standar kurikulum daerah dalam kegiatan belajar sehari-hari akan tetapi distribusi bahan ajar (buku paket) ke Badau sendiri belum sampai sedangkan di wilayah Badau tidak ada penjual yang menjajakan buku tersebut. Oleh karena itu, siswa di Badau hanya diajarkan kurikulum seadanya sesuai dengan ketersediaan bahan ajar di Badau saja.

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa siswa Badau masih diajar dengan kurikulum yang lama. Kenyataan tersebut faktanya menimbulkan keraguan masyarakat untuk memilih instansi pendidikan Indonesia, dalam konteks ini Badau. Seiring dengan semakin banyaknya anak-anak Badau yang lebih memilih sekolah di Lubok Antu dan Serawak untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Fakta-fakta yang menyangkut dunia pendidikan tersebut harus menjadi satu cambuk bagi instansi pendidikan pusat untuk lebih memperhatikan pendidikan di wilayah perbatasan, mengingat pendidikan merupakan salah satu aspek vital bagi pembangunan Indonesia kedepannya.

#### **Ketiadaan Jaminan Perlindungan Hukum Masyarakat Badau**

Perlindungan hukum menjadi satu isu penting dalam konteks kehidupan masyarakat Badau sebagai wilayah perbatasan, mengingat hal tersebut akan terkait dengan jaminan keamanan masyarakat. Letak geografis yang berada persis bersebelahan dengan Serawak (Malaysia) seakan menyiratkan munculnya potensi konflik dan perselisihan kecil diantara masyarakatnya, terlebih keduanya (Indonesia-Malaysia) memiliki sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu akan menjadi suatu masalah yang rumit jika warga negara dari Indonesia melakukan pelanggaran hukum di wilayah Serawak, dan juga sebaliknya.

Pada dasarnya masyarakat Badau telah memiliki instansi-instansi penjamin hukum dan keamanan antara lain : Komando Rayon Militer (Koramil) 1206/ 04 Badau, Kepolisian Sektor (Polsek) Nanga Badau dan Kompi Pamantas. Secara hakiki, ketiga instansi tersebut memberikan perlindungan kepada masyarakat perbatasan.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan dapat berwujud peraturan, karena melalui peraturan instansi keamanan dapat mengatur dan mengontrol kegiatan masyarakat. Akan tetapi, minimnya pengontrolan dari pusat menjadikan peraturan di Badau seakan kehilangan esensinya. Dengan kata lain, peraturan-peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Salah satu peraturan yang nampak sangat jelas tidak berjalan dengan baik yakni peraturan terkait dengan ketertiban masyarakat. Dalam konteks wilayah perbatasan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab dari pihak aparat kepolisian, sedangkan aparat keamanan yang lain

<sup>6</sup>Data bersumber dari Laporan Kecamatan Badau tahun 2012

bertugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dalam konteks hubungan internasional (keamanan dan keutuhan Republik Indonesia).

Salah satu peraturan kepolisian yang tidak berjalan dengan baik yakni peraturan berlalulintas. Berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu pemandangan yang sudah sangat wajar di perbatasan. Bahkan pihak aparaturnegara dan pihak kepolisianpun sering kali terlihat tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Tindakan pelanggaran hukum terkait ketertiban masyarakat juga merujuk pada tingginya pengonsumsi alkohol di wilayah perbatasan.

Warga perbatasan seringkali menggunakan minum-minuman keras sebagai salah satu komoditi untuk melakukan pesta berfoya-foya. Tingginya tingkat konsumsi alkohol tersebut pada dasarnya juga dikuatkan dengan tradisi adat akan kebiasaan meminum jenis alkohol tertentu. Pengonsumsi alkohol akan semakin mengganggu ketertiban masyarakat ketika telah terjadi berbagai macam tindak kriminal seperti perselisihan atau kericuhan antar warga masyarakat yang dipicu oleh kondisi tak sadarkan akal akibat mabuk alkohol. Pemakluman-pemakluman yang diberikan oleh aparaturnegara, khususnya pihak kepolisian seakan menggambarkan adanya praktek penyalahgunaan peraturan atau tidak berjalannya peraturan di kawasan perbatasan.

Peraturan negara yang tidak berjalan dengan baik juga dapat ditinjau melalui fakta – fakta yang muncul terkait dengan distribusi barang antar kedua negara. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan yang kompleks terkait dengan hubungan kedua negara (Malaysia – Indonesia), terlebih sejak berdirinya pos lintas batas. Akan tetapi hadirnya pos lintas batas resmi di Badau tidak lantas menjamin berlangsungnya berbagai macam peraturan yang menyertai setiap perpindahan barang di wilayah perbatasan.

Pemberlakuan bea dan cukai pada komoditi tertentu misalnya, seringkali tidak dihiraukan oleh masyarakat yang mendistribusikan barang dari kedua negara tersebut. Bahkan banyak diantara masyarakat baik Badau maupun Lubok Antu yang cenderung menyembunyikan barang-barang kena bea dan cukai dihadapan aparat pos lintas batas. Dampak atas kenyataan tersebut yakni masuknya barang-barang asing yang tidak terkontrol (dalam konteks ini merujuk pada Lubok Antu, Serawak).

Distribusi barang tersebut memang menjadi salah satu cara masyarakat Badau memenuhi kebutuhannya, akan tetapi disisi yang lain distribusi barang yang berlebihan terlebih terkait dengan barang-barang illegal dapat berpotensi memunculkan permasalahan hukum dikemudian harinya.

Pada dasarnya bentuk kegiatan illegal tersebut akan merujuk pada satu persoalan baru diperbatasan yakni budaya ‘penyogokan’. Sebagai

contoh kasus, mobil dan sepeda motor milik masyarakat Badau pada dasarnya tidak boleh dibawa keluar Badau (Indonesia), jikalau diperbolehkan mobil dan kendaraan tersebut harus memiliki surat-surat khusus ijin perlintasan batas. Namun pada kenyataannya kendaraan-kendaraan tak bersurat ijin dengan lancar melintasi PPLB untuk menuju Badau dan dari Badau dengan memberikan uang *sogokan* (biasanya Rp.50.000,00-Rp.100.000,00).

Salah satu contoh lain yakni jual beli mobil bekas illegal tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang asli. Mobil bekas dari Lubok Antu dijual dengan harga murah ke wilayah Badau tanpa surat kepemilikan kendaraan bermotor yang jelas. Fenomena tersebut merupakan satu bentuk respon atas adanya kebijakan masa berlaku bagi mobil di Malaysia. Kepemilikan mobil secara illegal di Badau nampak dibiarkan oleh aparaturnegara keamanan, lantas jika disuatu hari nanti muncul permasalahan terkait dengan tindak illegal tersebut oleh pihak Malaysia, pihak aparaturnegara keamanan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang jelas.

Kasus penganiayaan buruh kebun sawit milik asing (Serawak, Malaysia) merupakan salah satu bentuk kurang adanya perhatian pemerintah atas keamanan masyarakat Badau. Bidang perkebunan menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian masyarakat Badau, mengingat masih banyak penduduk yang memiliki lahan-lahan produktif. Selain itu, masyarakat yang tersingkirkan dari jenis pekerjaan formal lebih mendominasi pada sektor buruh perkebunan.

Terdapat beberapa PT perkebunan sawit yang beroperasi di pinggiran wilayah Badau dan masing-masing PT pastilah telah memiliki kebijakan tersendiri dalam proses produksinya. Jumlah pekerja yang banyak menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik-konflik antar pekerja dan konflik antara pekerja dan PT sawit. Salah satu pekerja Indonesia yang kebetulan berasal dari Jawa yang bekerja di salah satu perkebunan sawit Malaysia mengalami perselisihan dalam area kerjanya hingga akhirnya memaksa dirinya untuk kabur dari kontrak kerja dan lokasi perkebunan kembali ke Badau melalui jalur-jalur tikus<sup>7</sup>.

Pada konteks kasus ini, aparaturnegara keamanan Indonesia cenderung terlihat membiarkan begitu saja dan tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja

7Jalur tikus merupakan istilah untuk merujuk jalan-jalan kecil atau jalan alternatif yang menghubungkan Badau dan Lubok Antu. Pada umumnya jalur ini tidak dijaga secara resmi oleh aparaturnegara keamanan dan menjadi jalur illegal masyarakat antar dua negara tersebut

Indonesia tersebut. Berdasar pada berbagai kasus yang telah saya paparkan dapat terlihat jika masyarakat Badau yang tinggal di wilayah perbatasan masih sangat membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum dalam kegiatan kesehariannya.

Bentuk jaminan dan perlindungan hukum menjadi salah satu aspek vital bagi kelangsungan hidup masyarakat guna mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Pernyataan tersebut pada dasarnya merupakan respon atas kondisi geografis Badau yang terletak di wilayah perbatasan yang nota bene menjadi daerah rawan konflik dan kepentingan.

Pada dasarnya instansi-instansi keamanan telah ditugaskan di Badau dan ditempatkan pada titik-titik strategis secara geografis di Badau. Jumlah aparat yang bertugas pun juga telah memenuhi syarat, dalam artian mampu mengontrol dan mengemban tanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan masyarakat Badau.

Namun, yang menjadi satu permasalahan dalam konteks ini adalah kurangnya perhatian aparat keamanan untuk dapat menegakan peraturan hingga menghasilkan suatu jaminan perlindungan hukum terhadap seluruh lini masyarakat Badau (baik yang pendatang maupun yang asli). Pada konteks ini, aparat keamanan merupakan sebuah simbolisasi hadirnya negara namun bersifat semu karena dalam kenyataannya penduduk perbatasan jauh dari perlindungan negara (Safitri, 2013; Manurung, 2006).

Pada konteks ini negara merujuk pada individu-individu atau kelompok-kelompok sosial yang memegang monopoli atas kekuatan-kekuatan yang terdiri dari seperangkat lembaga (pemerintah, birokrasi, angkatan bersenjata dan dewan perwakilan) dan mereka yang mengendalikan secara formal (Chalmers, 1996). Dinamika-dinamika sosial dan politik yang terjadi dalam keseharian masyarakat Badau sudah selayaknya menjadi prioritas utama para aparat keamanan disamping menjaga batas geografis wilayah NKRI saja.

#### **'Ketidakpastian' Masyarakat Badau**

Badau yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia faktanya harus menerima konsekuensi yang cukup besar terkait dengan masalah distribusi barang, jasa dan informasi yang kerap kali tidak lancar. Bahkan dalam beberapa aspek, Badau dapat dinyatakan tertinggal dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki akses lebih mudah ke pemerintahan pusat. Akses masyarakat Badau yang masih terbatas terkait dengan pemerintah pusat Indonesia pada akhirnya memunculkan suatu dampak besar yakni ketidakpastian, baik dalam konteks masa kini atau yang tengah berlangsung maupun masa depan yang akan datang. Ketidakpastian akan masalah distribusi pangan,

pendidikan, kesehatan hingga pada keamanan menjadi permasalahan ketiga yang dimiliki oleh masyarakat Badau di wilayah perbatasan.

Bentuk pertama dari ketidakpastian yang dirasakan oleh masyarakat Badau yakni terkait dengan jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di Badau menjadi salah satu faktor yang mendasari munculnya ketidakpastian tersebut. Selain itu tidak tersedianya program pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat Badau juga menjadi satu permasalahan di lingkungan masyarakat Badau. Kedua faktor tersebut lantas menghasilkan satu kesimpulan bahwa pada umumnya masyarakat Badau tidak memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat digunakan dalam persaingan di dunia kerja. Oleh karena itu, banyak masyarakat Badau yang tidak memiliki kesempatan dalam mencari jenis pekerjaan formal dan posisi strategis lainnya dalam struktur pemerintahan melainkan justru merujuk pada jenis-jenis pekerjaan non-formal seperti wirausaha dan buruh perkebunan.

Jenis pekerjaan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Badau tersebut lantas memunculkan satu permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat Badau sendiri yakni ketidakpastian pendapatan. Dengan kata lain, jumlah *income* dalam jenis pekerjaan non-formal biasanya tidak dapat dipastikan besarnya. Jika dikaji lebih jauh lagi, jenis pekerjaan dan *income* merupakan faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak hanya jenis pekerjaan yang tidak pasti melainkan juga menyangkut permasalahan yang vital yakni tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan yang tidak pasti tingkatannya.

Bentuk akan ketidakpastian yang lain terkait dengan bidang kesehatan. Pada dasarnya masyarakat Badau yang nota bene masih berstatus sebagai warga negara Indonesia mendapatkan program-program bantuan kesehatan seperti Jamkesmas, program bantuan persalinan dan program lain yang sejenis guna menunjang kesehatan masyarakat perbatasan khususnya manula. Namun, pada kenyataannya masyarakat perbatasan jauh dari penerapan berbagai program tersebut.

Fakta terkait dengan kesehatan ini berbanding terbalik dengan program dan tunjangan kesehatan yang diberikan Malaysia kepada manula di wilayah perbatasannya. Para manula Malaysia yang tinggal di wilayah pinggiran Lubok Antu. Mereka diberikan berbagai bentuk tunjangan, seperti tunjangan kesehatan, bahan pokok, bangunan rumah atau tempat tinggal hingga pada distribusi penyaluran listrik yang gratis, sedangkan para manula di wilayah perbatasan Indonesia tepatnya di Badau justru harus hidup dalam ketidakpastian.

Selain ketidakpastian jaminan kesehatan yang diberikan, para masyarakat Badau pada

umumnya terkadang masih ragu dan mempertimbangkan banyak hal untuk berobat di puskesmas setempat terlebih jika penderita mengidap penyakit yang parah, mengingat fasilitas medis dan kualitas tenaga medis yang masih terbatas.

Fakta terkait ketidakpastian juga terlihat dalam instansi pendidikan, merujuk pada uraian Kepala Sekolah SDN 01 Badau tentang program tunjangan bagi tenaga pengajar perbatasan. Tunjangan gaji tenaga pengajar perbatasan biasanya dibayarkan dalam kurun waktu 3 bulan sekali melalui rekening bank yang telah ditunjuk sebagai partner pendistribusian uang, namun faktanya muncul berbagai permasalahan termasuk keterlambatan pendistribusian tunjangan hingga berbulan-bulan. Selain itu persoalan lain yang muncul yakni penetapan nama penerima tunjangan yang tidak boleh *double* atau dengan kata lain para tenaga pengajar tidak boleh terdaftar dalam beberapa program tunjangan pendidikan.

Distribusi bahan pangan, sarana dan fasilitas pendidikan hingga pada alat kesehatan yang tidak lancar juga menjadi satu masalah yang menimbulkan suatu kondisi tidak pasti bagi masyarakat Badau. Tidak adanya jadwal tetap dalam upaya pengiriman berbagai barang dan berkas ke perbatasan (Badau), berujung pada ketidaktersediaan barang pemenuh kebutuhan masyarakat. Kondisi yang tidak pasti tersebut lantas membuat masyarakat Badau harus menggantungkan hidupnya pada tetangga yang dalam konteks ini merujuk pada Lubok Antu, Serawak.

Ketergantungan masyarakat Badau terhadap masyarakat Lubok Antu dapat dilihat pada beberapa aspek seperti bahan pangan. Berbagai sayuran, lauk pauk dan kebutuhan dapur yang lain justru didatangkan langsung dari pasar Lubok Antu. Bahkan banyak diantara para penjual kelontong di pasar merupakan anak buah dari toke<sup>8</sup> Lubok Antu.

Ketergantungan lain juga terlihat pada bidang pendidikan, dimana banyak anak dan remaja Badau yang lebih memilih bersekolah di Lubok Antu dengan fasilitas yang layak dibandingkan dengan bersekolah di Badau yang tidak pasti pengiriman bahan ajarnya termasuk kurikulumnya. Hal serupa juga terjadi pada bidang lain, seperti kesehatan.

Masyarakat Badau yang memiliki kartu identitas ganda (KTP dan IC) biasanya akan memanfaatkannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan potongan-potongan harga tertentu, bahkan terkadang dalam beberapa kepentingan seperti melahirkan justru digratiskan.

<sup>8</sup>Toke merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut para pemilik modal dan pemasok barang-barang kebutuhan pangan dari Lubok Antu

Anak-anak yang lahir di Serawak akan langsung menerima IC dan tunjangan-tunjangan lain yang berbentuk hadiah kelahiran. Ketidakpastian jenis pekerjaan di Badau juga mendorong masyarakat Badau untuk bergantung pada Lubok Antu (Serawak) terkait dengan pencarian income. Faktanya banyak masyarakat Badau yang bekerja di Lubok Antu dan sekitarnya, baik bekerja sebagai pekerja legal dan illegal seperti pegawai di pasar, pelayan toko, pembantu rumah tangga hingga pada pekerja perkebunan. Berbagai bentuk ketergantungan yang terjalin antara masyarakat Badau dan Lubok Antu (Serawak) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh suatu kondisi ketidakpastian yang menuntut masyarakat untuk beralih orientasi guna meneruskan hidupnya.

### **Kesimpulan**

Masyarakat perbatasan selalu berkaitan dengan 'keterbatasan' dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemenuhan pangan, pendidikan, kesehatan hingga pada keamanan. Keterbatasan yang dihasilkan dari proses distribusi tidak lancar tersebut menjadi satu isu besar dalam tulisan ini. Berbagai bentuk keterbatasan telah membuat masyarakat perbatasan yang dalam konteks ini merujuk pada masyarakat Badau, hidup 'terlantar'.

Terdapat tiga poin penting dalam tulisan ini. Pertama yakni kesulitan masyarakat Badau dalam mendapatkan akses dan asetnya sebagai warga negara Indonesia. Kesulitan yang dialami masyarakat pada akhirnya membuat masyarakat Badau hidup dalam keterbatasan bahkan dapat dikatakan 'tertinggal' bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Letak geografis, jarak dan kondisi jalan nampak menjadi masalah utama yang melatarbelakangi berbagai kesulitan masyarakat Badau.

Kedua yakni kondisi demografi dan kenampakan alam di Badau yang berbukit-bukit dan kurang subur tidak memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkannya. Dengan kata lain, sumber daya alam yang dimiliki Badau tidak mampu merespon berbagai bentuk keterbatasan dan kesulitan yang dialami masyarakat Badau. Kondisi tersebut justru semakin menambah permasalahan di Badau. Keterbatasan dan kesulitan masyarakat Badau tidak hanya merujuk pada bahan pangan, pendidikan, kesehatan dan keamanan saja melainkan juga sulit untuk mengakses sumber daya alam. Berbagai kesulitan akan akses yang berujung pada keterbatasan masyarakat di Badau semakin terlegitimasi dengan poin yang ketiga yakni kurangnya perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap Badau sebagai wilayah perbatasan. Jarak menjadi persoalan utama terkait dengan konteks ini, dalam artian jauhnya jarak antara Badau dengan pemerintahan pusat semakin jauh juga interaksi yang terjalin diantara keduanya.



Badau sebagai wilayah perbatasan Indonesia lantas menjadi suatu wilayah yang *stateless*<sup>9</sup>.

Berbagai kesulitan dan keterbatasan yang membuat masyarakat Badau 'terlantar' faktanya memunculkan satu fenomena pada masyarakat Badau yakni ketergantungan kepada negara tetangga (Lubok Antu, Serawak). Ketergantungan masyarakat Badau tidak hanya pada pemenuhan bahan pokok saja melainkan juga pada pemenuhan fasilitas-fasilitas penunjang hidup lain seperti pendidikan, kesehatan hingga pada distribusi listrik. Masyarakat Badau saat ini masih menggunakan aliran listrik dari Lubok Antu, meskipun keadministrasiannya masih di kontrol oleh PLN Indonesia.

Ketergantungan masyarakat Badau terhadap Lubok Antu faktanya telah dimaklumi oleh berbagai instansi pemerintahan yang bertugas di Badau. Distribusi barang hingga jasa nampak telah menjadi suatu aktivitas yang biasa, bahkan kelebihan jumlah barang yang dipertukarkan pun tidak menjadi suatu bentuk pelanggaran lagi.

Pada dasarnya bentuk ketergantungan masyarakat Badau terhadap Lubok Antu (Serawak) merupakan respon dan perlawanan terhadap kondisi dan pemerintahan Indonesia yang terkesan acuh terhadap keberadaan dan perkembangan masyarakat Badau. Kondisi yang terjadi di Badau tersebut sejalan dengan pandangan Siahaan dan Scott dimana ketidakpuasan akan bermuara pada berbagai bentuk perlawanan terhadap negara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memiliki ideologi untuk melawan (Siahaan, 1999; Scott, 1985). Ketergantungan masyarakat Badau sebagai respon atas berbagai keterbatasan tidak hanya mencerminkan kondisi masyarakat yang 'terlantar' melainkan juga berpotensi untuk menurunkan simpati dan loyalitas masyarakat Badau terhadap NKRI.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2013. "Daerah Perbatasan: Misrepresentasi Pembangunan dari Belakang", dalam Irwan Abdullah (ed.), *Badau Pasti Berlalu: Catatan Perjalanan dari Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat*. Yogyakarta: TICI Publications.
- Badau, Laporan Tahunan Kecamatan Badau Tahun 2012
- Chalmers, Ian. 1996. *Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Detail map of Nanga Badau [http://www.maplandia.com/indonesia/kalimantan-barat/kapuas-](http://www.maplandia.com/indonesia/kalimantan-barat/kapuas-hulu/nangabadau)

[hulu/nangabadau](http://www.maplandia.com/indonesia/kalimantan-barat/kapuas-hulu/nangabadau). Diakses pada 3 April 2013 pukul 16.00 WIB

- Manurung, Lisman. 2006. "Pengembangan Kawasan Pulau-pulau Terluar dengan Pola Kemitraan Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*)", dalam *Jurnal Nasion*, Vol. 3, Nomor 2 Desember. Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN).
- Safitri, Ririh Megah. 2013. "Fungsidan Disfungsi Negara di Perbatasan: Potret Kehidupan di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat", dalam Irwan Abdullah (ed.), *Badau Pasti Berlalu: Catatan Perjalanan dari Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat*. Yogyakarta: TICI Publications.
- Scott, James. J. 1985. *Weapons of the Weak, Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Heaven: Yale University Press
- Siahaan, Hotman. *Konstitusionalisme, Pembangkangan Sipil dan Demokrasi*. Makalah dalam sehari tentang Konstitusionalisme, Pembangkangan Sipil dan Demokrasi tanggal 1 Maret 1999 di Gedung UC UGM diselenggarakan oleh Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogya

<sup>9</sup>Stateless merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan posisi dan peran negara yang tidak hadir dalam suatu wilayah.